



MENGGUGAT LOGIKA PEMBANGUNAN: KRITIK KARL POLANYI ATAS KELANGKAAN SEBAGAI DESAIN KEKUASAAN

Wilhelmus F. N. Runesi

Fakultas Filsafat, Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang

Email Korespondensi: runesioemais@gmail.com

Received: July 21, 2025

Accepted: February 5, 2026

Published: April 27, 2026

Abstract

The order of the universal of human life is no longer natural, because during this time, humans live in a world full of the hustle and bustle of economic and political transactions that have exceeded the limits of space and time. Karl Polanyi, in his intellectual struggle, showed a paradox: what we enjoy in this world is not natural. The extraordinary changes that have occurred this century are a design. Economics, politics, the concept of human rights, and political freedom or democratic government are part of the rhetoric of this limitation. However, in addition to the design of the current rhetorical arguments, society lives in a world of extraordinary deprivation, poverty, and oppression. Various problems, both new and old, are mixed together and can no longer be separated. Poverty, unmet basic needs, widespread hunger, violations of political freedom, and legal transactions have finally become banal. Polanyi gives us a basis for thinking about history and the internal logic of economics because only in this way can we understand that social problems, such as restricted access to abundance, scarcity, and the failure to fully satisfy society's needs, are rhetorical devices that make problems sound like natural events.

Keywords: *scarcity, neoliberal, market system, market society, fictitious commodity, power's design, natural*

Abstrak

Tatanan universal kehidupan manusia tidak lagi alami, karena selama ini, manusia hidup di dunia yang penuh dengan hiruk-pikuk transaksi ekonomi dan politik yang telah melampaui batas ruang dan waktu. Karl Polanyi, dalam perjuangan intelektualnya, menunjukkan paradoks: Apa yang kita nikmati di dunia ini adalah sesuatu yang tidak alami. Perubahan luar biasa yang terjadi pada abad ini adalah sebuah desain. Ekonomi, politik, konsep hak asasi manusia, dan kebebasan politik atau pemerintahan demokratis adalah bagian dari retorika pembatasan ini. Namun, selain desain argumen retorika saat ini, masyarakat hidup di dunia yang luar biasa kekurangan, kemiskinan, dan penindasan. Berbagai masalah, baik yang baru maupun yang lama, bercampur menjadi satu sama lain dan tidak bisa lagi dipisahkan. Kemiskinan, kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, kelaparan yang meluas, pelanggaran kebebasan politik, dan transaksi hukum akhirnya menjadi dangkal. Polanyi memberi kita dasar untuk berpikir tentang sejarah dan logika internal ekonomi karena hanya dengan cara ini, kita dapat memahami bahwa masalah sosial seperti terbatasnya akses ke kelimpahan, kelangkaan, dan kegagalan untuk sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat adalah desain retorik sehingga masalah terdengar seperti peristiwa alam.

Kata Kunci: *kelangkaan, neoliberal, sistem pasar, masyarakat pasar, komoditas fiktif, desain kekuasaan, alami.*



A. Pendahuluan

Dalam pemikiran ekonomi arus utama, ukuran yang dipakai untuk menilai kemajuan dan aspek kesejahteraan suatu negara adalah pertumbuhan ekonomi yang dihitung berdasarkan seberapa besar pendapatan per kapita dan Produk Domestik Bruto (PDB)/Produk Domestik Bruto (GDP) dalam satu tahun. Sebagai respons terhadap bentuk penilaian itu, setiap negara dituntut untuk mampu memanfaatkan dan mengolah sumber daya yang dimiliki.¹ Atas temuan komisi bentukan Presiden Perancis tersebut kemudian seakan menegaskan apa yang pernah dikemukakan oleh Ernest Gellner sebagaimana dikutip oleh Haryatmoko bahwa “legitimasi masyarakat modern bergantung pada kemakmuran dan pertumbuhan ekonomi,”² yang menunjukkan perubahan cara pandang dari kesejahteraan berdasarkan pendapatan per kapita menjadi kesejahteraan berdasarkan kebahagiaan manusianya, sekaligus memberikan cara pandang baru dalam tata kelola negara untuk menjawab tuntutan kebutuhan masyarakatnya agar dapat terpenuhi. Maka masuklah pengaruh globalisasi dengan logika pasar bebas dengan narasi lapar dan laba. Dengan demikian, negara-negara abstrak seperti Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF), dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) berdasarkan pada perjanjian Bretton Woods melebarkan sayap kebijakannya dengan dalih pemerataan ekonomi dan menjaga stabilitas hubungan internasional.³ Propaganda yang dilakukan oleh lembaga-lembaga di atas mengatakan bahwa perdagangan bebas adalah jaminan untuk mencapai kesejahteraan. Tetapi kenyataannya merupakan bagian dari proses kapitalisasi untuk penguasaan terhadap sumber daya dalam konteks global.⁴

Melalui upaya pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat di negara-negara Dunia Ketiga, kapitalisme berhasil masuk ke bagian terdalam dari hasrat manusia. Apa yang kemudian menjadi penting untuk diperhatikan adalah bahwa kapitalisme modern berhasil memengaruhi bahkan mengendalikan seluruh tatanan aspek hidup manusia yang alamiah berdasarkan mekanisme harga dan mengabaikan nilai etis dalam setiap tindakan ekonomi. Salah satunya adalah pemanfaatan komoditas yang didasarkan pada logika permintaan dan penawaran (*Supply and Demand*). Globalisasi menjadi satu jaring yang menghubungkan seluruh permainan ekonomi dunia. Menurut Stiglitz, ada keterkaitan antara mengglobalnya jaringan perdagangan dan konflik kekuasaan yang terlibat secara inheren dalam setiap transaksi ekonomi.⁵ Konflik kekuasaan yang melibatkan transaksi ekonomi negara-negara abstrak kemudian berpengaruh terhadap negara-negara Dunia Ketiga seperti Indonesia.

¹ Standar ini paling tidak berlaku hingga tahun 2009 ketika sebuah komisi bentukan Presiden Perancis Nicolas Sarkozy melaporkan hasil penelitiannya, yang menunjukkan bahwa bukan lagi PDB sebagai standar kesejahteraan, tetapi kesejahteraan dinilai dari indeks kebahagiaan manusianya. [Lih. Joseph Stiglitz, Amartya Sen, & Jean-Paul Fitoussi, *Mengukur Kesejahteraan: Mengapa Produk Domestik Bruto Bukan Tolok Ukur yang Tepat untuk Menilai Kemajuan?*, (Jakarta: Penerbit Marjin Kiri, 2011)]

² Haryatmoko, *Dominasi Penuh Muslihat: Akar Kekerasan dan Diskriminasi*, (Jakarta: Penerbit Gramedia, 2010), 235

³ Joseph Stiglitz, *Globalization and its Discontents*, (London: W.W Norton & Company, 2002), 4; David Harvey, *A Brief History of Neoliberalism*, (New York: Oxford University Press, 2005), 10

⁴ Joseph Stiglitz, *The Roaring Nineties: Why We're Paying the Price for the Greediest Decade in History*, (London: Penguin Books, 2003), 217-220

⁵ Joseph Stiglitz, *Globalization and its Discontents*, 81

Indonesia dalam visi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memberikan ruang yang besar bagi investasi di bidang pertambangan, infrastruktur, pariwisata, dan bidang lainnya. Peraturan Presiden serta rancangan undang-undang ditetapkan guna memberikan kemudahan proses investasi, misalnya, pemberian jaminan dalam bentuk jangka waktu untuk pertambangan serta hak guna usaha,⁶ dan pengalihan status untuk bidang pariwisata.⁷ Perubahan alih-fungsi hutan dari tangan masyarakat ke tangan segelintir orang atas nama pemerintah tanpa ada kordinasi sosila yang jelas dengan masyarakat adat setanah menimbulkan masalah yang baru. Yang terjadi, masyarakat tidak lagi bebas untuk mengakses apa yang tersedia. Dengan kata lain, masyarakat adat yang bergantung hidup dari alam mulai terusir dari hutan, gunung Mutis di Nusa Tenggara Timur, misalnya, sebagai tempat ruang hidup, sebab pengalihan status dari cagar alam menjadi Taman Nasional, sekaligus peralihan tata kelola dari masyarakat setempat ke pemerintah. Dengan perubahan tata kelola, sekaligus terjadi ketercerabutan (*disembeddedness*) masyarakat adat dari hubungan yang erat dengan alam. Di sini, masyarakat lalu mengalami apa yang kemudian disebut Polanyi sebagai postulat kelangkaan (*scarcity postulate*).⁸

Dengan menyusuri kembali arus sungai sejarah, istilah kelangkaan (*scarcity*) dalam satu dan lain halnya merujuk pada kondisi kekurangan atau ketidakcukupan yang akut. Istilah kelangkaan (*scarcity*) setidaknya digunakan sejak abad ke-13 yang ketika itu merujuk pada wabah kelaparan yang melanda Eropa sejak tahun 1315-1317. Kemudian meluas ke beberapa wilayah Eropa hingga tahun 1322. Wabah itu juga dikenal sebagai *Great Famine* yang menandai krisis terbesar dan berdampak terhadap wilayah Eropa awal abad ke-14. Krisis berskala besar ini menyebar mulai dari Polandia hingga pegunungan Alpen sekaligus menandai berakhirnya periode kemakmuran yang berlangsung dari abad ke-11 hingga abad ke-13.⁹ Kelaparan itu dimulai dengan kondisi cuaca buruk yang melanda Eropa pada musim semi tahun 1315 di mana hujan lebat disertai suhu yang sangat dingin menyebabkan tanaman tidak dapat tumbuh sehingga mengakibatkan gagal panen berturut-turut hingga tahun 1317. Akibat krisis itu, masyarakat Eropa mengalami peningkatan kasus kejahatan, penyebaran penyakit,

⁶ Bdk. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 yang memberi jangka waktu Hak Guna Usaha (HGU) bagi investor di Ibu Kota Nusantara seama 190 Tahun. Mirisnya, negara Indonesia belum berusia 100 tahun. Dalam Laporan Konflik Agraria dan Kebijakan Agraria di Masa Transisi Politik, menunjukkan bahwa terjadi peningkatan persentase letusan konflik agraria sejak 2021-2024. [Lih. Badan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), *Adakah Reforma Agraria di Bawah Komando Prabowo?: Catatan Akhir Tahun 2024*, (Desember 2024), 12]

⁷ Untuk kasus ini, tempat wisata yang diubah statusnya dari cagar alam menjadi taman nasional seperti cagar alam Mutis Timau yang diubah statusnya menjadi taman nasional melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 946 tahun 2024, kebijakan ini dinilai berdampak buruk bagi keberadaan masyarakat adat yang hidup di wilayah tersebut yang selama ini bergantung hidup pada ketersediaan alam Mutis. [Lih. Laporan Tahunan 2023 Badan KPA, *Dekade Krisis Agraria: Warisan Nawacita dan Masa Depan Reforma Agraria Pasca Perubahan Politik 2024*, (Desember 2023), 71]

⁸ Karl Polanyi, "The Economy as Instituted Process" dalam, Karl Polanyi, Conrad M. Arensberg & Harry W. Person, (ed.), *Trade and Market in the Early Empires: Economic in History and Theory*, (USA: The Free Press, 1957), 246

⁹ Lih. William Chester Jordan, *The Great Famine: Northern Europa in the Early Fourteenth Century*, (Princeton: Princeton University Press, 1996), 7-8

banyaknya kematian, dan tindakan ekstrem seperti kanibalisme dan pembunuhan bayi yang menggarisbawahi tekanan dan penderitaan ekstrem penduduk.¹⁰

Seiring berlalunya waktu, istilah kelangkaan kemudian digunakan untuk menunjukkan kondisi serba kekurangan yang sesungguhnya tidaklah alamiah, melainkan didesain dalam kebijakan ekonomi politik kekuasaan, dalam kaitannya dengan sistem pasar dan kapitalisme yang memanfaatkan aspek hasrat ketidakpuasan manusia. Dalam kerangka berpikir demikian, Karl Polanyi melalui bukunya *The Great Transformation* membicarakan mengenai sistem pasar (*market system*) yang bergerak dan membentuk masyarakat pasar (*market society*). Sistem ini memandang alam dan manusia sebagai komoditas.¹¹ Caranya, kapitalisme menciptakan fantasi yang memikat subjek untuk bersedia menginvestasikan diri ke dalam sistem kapitalis; ia memperkenalkan penyebab kelangkaan (kekurangan alamiah) dan secara masif membangkitkan ilusi kekurangan; lalu memberikan solusi (akumulasi kapital tanpa batas) yang mengarah kepada kelimpahan semu di masa depan (*that will lead to future abundance*).¹² Yang perlu diingat adalah ketika “yang alamiah” direduksi menjadi “komoditas”, nilainya tidak lagi dilihat sebagai suatu ketersediaan alamiah, melainkan “komoditas yang nilainya ditentukan oleh narasi untung-rugi.”¹³

Dengan tindakan tersebut, muncullah berbagai persoalan ketimpangan sosial, ketidakadilan, kriminalisasi, kemiskinan, dan kelaparan. Dengan kata lain, krisis sosial yang terjadi tidak lepas dari tindakan eksploitasi sumber daya alam, di mana hasil alam seperti pohon, tanah, dan hutan yang secara alamiah melimpah untuk dimanfaatkan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, mengalami perubahan status menjadi komoditas dalam arti bahwa untuk menghasilkan harga jual yang tinggi, oleh pemerintah, yang melimpah itu harus menjadi langka. Oleh karena itu, tanah, dan pohon yang merupakan ketersediaan alamiah, diubah menjadi komoditas yang dapat diperjualbelikan.¹⁴

B. Metode

Penelitian ini, menggunakan pendekatan kualitatif, yakni studi pustaka. Studi pustaka melibatkan pengumpulan informasi dari sumber-sumber yang telah ada seperti buku, artikel jurnal, internet dan dokumen resmi lainnya, yang bertujuan untuk memahami perkembangan serta menemukan cela antara topik yang telah dibicarakan dengan temuan yang baru dalam penelitian ini. Dengan kata lain, proses ini melibatkan kritisisme dan sintesis mengenai pemahaman terhadap teori, metode dan hasil penelitian sebelumnya¹⁵ sebagai dasar kokoh bagi penelitian ini. Pustaka yang menjadi bahan kajian dalam penelitian ini adalah terkait dengan kritik Polanyi atas logika ekonomi pasar bebas yang menciptakan kelangkaan dan keterbatasan

¹⁰ William Chester Jordan, *The Great Famine*, 8

¹¹ Karl Polanyi, *The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time* (1st edition) (Boston: Beacon Press, 1944 [1957]), 68. Dalam catatan selanjutnya akan disingkat GT

¹² Todd McGowan, *Capitalism and Desire: The Psychic Cost of Free Markets*, (New York: Columbia University Press, 2016), 203-204

¹³ Karl Polanyi, *The Livelihood of Man: Studies in Social Discontinuity*, (ed.) Harry W. Pearson, (New York: Academic Press, 1977), 22

¹⁴ Karl Polanyi, *The Livelihood of Man*, 22

¹⁵ Lih. Edisi Khusus tentang Karl Polanyi dalam *Respons* (Jurnal Etika Sosial) Vol. 15, No.02 (2010); DOI: <https://doi.org/10.25170/respons.v15i02>

akses bagi masyarakat kecil atau masyarakat adat untuk istilah semasa ini. Desain kelangkaan ini dibungkus dengan narasi yang kemudian terdengar seperti kejadian alamiah.

C. Hasil dan Pembahasan

Sekilas tentang Karl Polanyi

Karl Polanyi lahir pada 25 Oktober 1886 di Vienna, Austria, dari keluarga yang telah jauh menganut tradisi akademik, intelektual dan politik. Masa kecil Polanyi dilalui dengan menjalani tradisi pendidikan klasik di rumah. Setelah tamat sekolah Gymnasium yang menitik-beratkan pada studi klasik serta ilmu-ilmu alam, sejak tahun 1904 Polanyi mulai belajar di universitas dalam bidang hukum dan politik, yang dikombinasi dengan sejarah serta ilmu-ilmu sosial dan berhasil meraih gelar doktor di bidang hukum pada tahun 1909. Kakaknya bernama Adolf adalah seorang pemimpin gerakan sosialis. Karena itu, masa kecil Polanyi dijalani dalam lingkungan yang revolusioner. Akan tetapi dalam kerangka intelektual, Polanyi berada pada posisi “yang dapat dikatakan sebagai idealis populis”.¹⁶ Tahun 1915, Polanyi dipanggil untuk tugas militer dalam Perang Dunia I namun jatuh sakit dan dirawat sejak 1917. Pada 1919 Polanyi kembali ke Vienna, tetapi menghadapi beberapa persoalan seperti problem emosional dan intelektualnya terus dihantui oleh kebrutalan perang. Di sisi lain, terjadi pembredelan majalah *Szabadgondolat* (di mana Polanyi pernah menjadi editor) oleh rezim komunis yang berkuasa saat itu. Selain itu, karena di Vienna dan Budapest pada masa itu merupakan titik temu kelompok-kelompok revolusioner, Polanyi lalu bertemu dan menikah dengan Ilona Duczynska yang juga merupakan seorang revolusioner. Oleh karena persoalan-persoalan di atas, di Vienna inilah Polanyi kembali serius mempelajari ekonomi dan sosiologi. Ia membaca *Das Kapital* Karya Marx, dan karya-karya ekonom Austria seperti Meger, Wieser, Bohm-Bawerk, Schumpeter, para ekonom marjinalis seperti P.H. Wicksteed dan J.B. Clark.¹⁷ Pada periode ini juga, Polanyi terlibat dalam perdebatan ekonomi dengan Ludwig von Mises terkait ekonomi sosialis, sambil menolak teori nilai kerja Marx.¹⁸

Polanyi kemudian dikenal sebagai teoretikus ekonomi yang menggagas satu istilah yang terkenal yakni, *embedded economic* (ketertanaman ekonomi) melalui karya besarnya berjudul *The Great Transformation* yang terbit pada tahun 1944. Walau dikenal sebagai penggagas istilah itu dalam bukunya, istilah itu bukanlah istilah kunci dalam seluruh bangunan teori dari argumen panjang buku itu. Hal itu serupa *the invisible hand*-nya Smith yang bukanlah gagasan kunci dalam bukunya *The Wealth of Nation* yang terkenal itu. Alih-alih membicarakan ketertanaman ekonomi, *The Great Transformation* lebih membicarakan mengenai sistem pasar (*market system*) yang bergerak dan membentuk masyarakat pasar (*market society*). Sistem inilah yang memandang alam dan manusia sebagai komoditas.¹⁹ Dalam bagian pengantar untuk buku Polanyi tersebut di atas, Stiglitz menulis: Polanyi memandang pasar (*market*) sebagai

¹⁶ Herry-Priyono, *Memburu Manusia Ekonomi, Menggeledah Naluri*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2022), 466

¹⁷ Herry-Priyono, *Memburu Manusia Ekonomi*, 466

¹⁸ Karl Polanyi-Levitt & Marguerite Mendell, “Karl Polanyi: His Life and Times”, dalam *Studies in Political Economy*, Vol. 22, No.1 (Spring 1987), 18-19

¹⁹ Karl Polanyi, *GT*, 68.

bagian dari kehidupan ekonomi yang lebih besar, walau akhirnya ekonomi yang besar itu menjadi bagian dari masyarakat (*society*) yang jauh lebih besar lagi.²⁰

Apa yang Polanyi sebut sebagai transformasi adalah adanya perubahan konsep ‘pasar’ itu sendiri, di mana sebelumnya pasar dilihat sebagai pembantu bagi koordinasi sosial – yang berdiri di atas tiga prinsip yakni resiprositas (*reciprocity*), redistribusi (*redistribution*), dan tata-rumah tangga (*householding*) – bertransformasi menjadi prinsip utama dari sistem pasar itu sendiri. Dengan kata lain, pasar (*market*) sebagai alat pertukaran diubah menjadi sistem organisasi seluruh masyarakat (*market system*). Bagi Polanyi, ekonomi merefleksikan dua tahap yang berbeda: *pertama*, hubungan manusia dengan alam; *kedua*, institusionalisasi sosial terhadap proses ekonomi.²¹

Yang Alamiah menjadi Komoditas

Ilmu pengetahuan memungkinkan manusia berkembang secara intelektual, tetapi pada saat yang sama, kebebasan alamiah manusia yang tanpa intervensi itu menempatkannya sebagai monster yang sangat kejam meluluh-lantakkan bumi dan segala isinya.²² Di sini, ilmu pengetahuan berkontribusi terhadap perkembangan peradaban, tetapi di saat yang sama, analisis sains juga digunakan sebagai alat yang memungkinkan tindakan eksploitasi. Hal itu terlihat jelas dalam pola pembangunan negara semasa ini yang selalu didahului oleh tindakan penghancuran. Seluruh tatanan semesta dengan segala keteraturan alamiahnya dihancurkan kemudian dibentuk ulang oleh dan sesuai dengan keinginan manusia (baca: kapitalisme) demi memenuhi hasrat ketidakpuasannya. Bahkan tindakan pengrusakkan itu seringkali bukan hanya permulaan, melainkan selama proses pembangunan, selalu dibarengi dengan penghancuran entah itu hutan maupun pemukiman. Di sana terjadi penghancuran sekaligus perampasan hak hidup dari segala makhluk hidup yang mendiami hutan dan sungai-sungai, bukit dan lembah, bahkan tak segan terjadi juga pada manusia itu sendiri yang dilakukan oleh tirani kekuasaan dan oligarki.²³ Ekonomi dalam pemahaman ini adalah satu pengetahuan tentang cara bagaimana sumber mata pencaharian dikelola kemudian dialokasikan walau dalam kondisi kelangkaan. Yang menjadi basis dari aktivitas pasar adalah tindakan pertukaran yakni memberi sesuatu untuk memperoleh sesuatu. Hal ini hendak menunjukkan bahwa barang dan jasa dari sumber daya yang langka tidak akan pernah memenuhi keinginan manusia.²⁴

Di sini Cavanaugh dalam satu bagian bukunya menyebut bahwa kelangkaan dan keberlimpahan (*scarcity and abundance*) hendak menegaskan bahwa dengan memahami makna ekonomi sebagai mata pencaharian, kita dapat sampai pada asumsi untuk melihat hubungan manusia dengan dunia [alam] sebagai sesuatu yang bersifat dialektis bahwa dalam aktivitas mata pencaharian, manusia berhubungan dengan alam. Mata pencaharian untuk

²⁰ Joseph Stiglitz, “Foreword”, dalam Karl Polanyi, *GT*, xv.

²¹ Karl Polanyi, *GT*, 68.

²² Bdk. Karlina Supelli, “Sains sebagai Keselamatan dalam Pandangan Francis Bacon”, dalam *Diskursus: Jurnal Filsafat dan Teologi*, Vol. 14, No. 1, April 2015, 101-140

²³ Bdk. Sergei Guriev and Daniel Treisman, *Spin Dictators: The Changing Face of Tyranny in the 21st Century*, (Princeton University Press, 2022), 14-15

²⁴ William T. Cavanaugh, *Being Consumed: Economics and Christian Desire*, (USA: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 2008), 90

memenuhi kebutuhan manusia itu tersedia oleh alam, dan dari alam itulah manusia dapat berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Walau demikian, ekonomi akan selalu menjadi ilmu yang membicarakan problem kelangkaan selama manusia masih menginginkan sesuatu yang lebih.²⁵ Dari sini kita memahami bahwa hanya manusia yang mengetahui dan mendefinisikan keberadaan alam, sebaliknya juga hanya karena berada dan berpijak pada alam, manusia dapat mencari tahu tentang kemanusiaannya sendiri. Dengan kata lain, karena berada dalam dunia, manusia benar-benar menjadi manusia. Dan karena manusia berada dalam dunia, maka dunia benar-benar menjadi dunia yang dipahami.²⁶

Alam memberi kemungkinan bagi manusia untuk mengakses dirinya. Dengan memahami hubungan keduanya, kita dapat mendudukan keduanya pada posisi apakah yang satu lebih tinggi dari yang lain atautkah keduanya setara. Imajinasi kita akan dituntun oleh hembus udara pengetahuan untuk dapat menjelaskan problem kelangkaan yang riang menari tiada henti yang disebabkan oleh sistem kerja kapitalisme. Bagi Harvey, Sejarah kapitalisme penuh dengan konsekuensi terhadap lingkungan sehingga penyebab kelangkaan yang berkaitan dengan lingkungan, bukan hanya sebatas dominasi tetapi juga soal bagaimana perkembangan praktik manusia yang berhubungan dengan dunia fisik dan jaringan kehidupan ekologis yang mengubah wajah bumi dengan cara yang dramatis dan seringkali tidak dapat dipulihkan kembali.²⁷

Harvey kemudian memperluas konsep ketertanaman (*embeddedness*) Polanyi dengan istilah *embedded liberalism* (liberalisme tertanam) untuk menunjukkan bahwa telah terjadi pergeseran aktivitas pasar. *Embedded liberalism* menandai bagaimana sistem ekonomi politik global pasca perang dunia II hingga tahun 1970-an. Di sinilah kita melihat kontribusi dari *embeddeed liberalism* yang dikembangkan oleh Harvey dengan menggabungkan antara liberalisme ekonomi (perdagangan bebas) dengan intervensi negara untuk menjaga hubungan internasional, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya berkaitan dengan perjanjian Bretton Woods di mana intervensi negara melalui organisasi-organisasi besar seperti Bank Dunia, IMF, dan WTO, guna menjaga sistem tenaga kerja dan jarring pengamanan sosial dan ekonomi untuk mencegah terulangnya peristiwa seperti Perang Dunia.²⁸ Walau begitu, masa ini yang disebut sebagai periode neoliberal yang ditandai dengan deregulasi, privatisasi, dan liberalisasi,²⁹ di mana Stiglitz menyebut itu sebagai periode paling rakus dalam sejarah. “Singkatnya, kinerja ekonomi pasar dikawal dengan seperangkat aturan yang membuat relasi antara modal dan tenaga kerja tidak selalu berakhir dengan subordinasi *labour* pada *capital*.”³⁰

²⁵ William T. Cavanaugh, *Being Consumed*, 90

²⁶ Alfons Taryadi, *Epistemologi Pemecahan Masalah Menurut Karl R. Popper*, (Jakarta: Penerbit Gramedia, 1989), 176

²⁷ Lih. David Harvey, *The Enigma of Capital and the Crises of Capitalism*, (Oxford: Oxford University Press, 2010), 185

²⁸ Lih. David Harvey, *A Brief History of Neoliberalism*, (New York: Oxford University Press, 2005), 11.

²⁹ Chris Hann and Keith Hart, “Introduction: Learning from Polanyi,” dalam *Market and Society: The Great Transformation Today*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2009), 8

³⁰ Lih. Joseph Stiglitz, *The Roaring Ninties* [khususnya bagian 1], 3

Dengan berangkat dari pemahaman metafisik ekonomi di atas, kita akan dipandu oleh satu pemahaman yang mendalam mengenai hubungan manusia dengan alam. Dengan begitu, kita bisa melihat keduanya pada posisinya yang tepat untuk menjawab persoalan kelangkaan yang diakibatkan oleh hasrat mengejar pertumbuhan ekonomi dalam kebijakan ekonomi politik dan kekuasaan, sembari memberi ruang eksploitasi bagi kaum kapitalis.³¹ Yang sering kali proses transaksi membawa masuk hasrat ekonomi kedalam kekuasaan, sehingga menjadi kekuasaan ekonomi yang pertama-tama merupakan kemampuan untuk memindahkan hasil produksi yang diciptakan melalui keringat banyak orang ke tangan sedikit orang. Selain itu, Stiglitz mengatakan bahwa kesenjangan pendapatan antara yang kaya dan yang miskin (*the haves and the have-nots*) memang sesuatu yang mencemaskan akan tetapi tindakan eksploitasi dengan pengabaian oleh negara-negara dunia pertama atas kemiskinan di negara-negara dunia ketiga merupakan sebuah tindakan pembunuhan.³²

Oleh karena itu, bagaimana kita melihat manusia sebagai *homo oeconomicus* dalam hubungannya dengan alam? Menurut Karl Polanyi, manusia, dalam hal ini sebagai makhluk ekonomi, merupakan salah satu dari tiga pilar – dua lainnya adalah: hak milik pribadi dan efisiensi – epistemik yang memberi basis bagi ekonomi pasar bebas.³³ Polanyi mengatakan hubungan manusia dan alam dapat dilihat dalam proses produksi, sebab di sana terjadi interaksi yang intens. Manusia dan alam merupakan dua entitas yang sakral. Akan tetapi jika mekanismenya diatur melalui bentuk regulasi diri (*self-regulating*) berupa barter atau pertukaran, maka manusia dan alam kemudian akan dihempas menuju orbit sirkulasi pasar; keduanya terpaksa harus tunduk pada persoalan penawaran dan permintaan (*supply and demand*), yang diperlakukan sebagai komoditas barang yang dapat diperjualbelikan.³⁴ Manusia dinilai berdasarkan tenaga kerja, sementara alam dinilai berdasarkan tanah yang dikelola. Pasar kemudian memberi harga sebagai nilai ekonomis untuk dua komoditas itu dengan nama upah (tenaga kerja) dan sewa (lahan/tanah).

Sistem ekonomi ini membebaskan pasar dari segala bentuk regulasi yang membatasi, membuat negara membuka pintu yang selebar-lebarnya bagi investasi asing. Dengan pemberian ruang investasi ini, menunjukkan bahwa supremasi hukum dalam demokrasi menjadi pembatas yang kokoh antara pasar investasi dan kebutuhan primer masyarakat setempat. Dengan kata lain, pasar semakin bebas menggerogoti ruang hidup masyarakat, sementara rakyat semakin terusir dari kodratnya sebagai manusia. Karena kaitan yang begitu kuat antara pasar dan kapitalisme, sehingga tidak mungkin kita membedakan ekonomi pasar sebagai ‘satu bentuk organisasi’ dari ‘kapitalisme’, sebab keduanya memiliki tiga karakter struktural yang identik: secara institusional, merupakan milik pribadi; secara motivasional, meningkatkan dan menambah keuntungan; dan dalam hal mekanisme koordinasinya, membentuk harga secara bebas. Karakter yang pertama berakibat pada pengambilan keputusan yang terdesentralisasi;

³¹ Bdk. Todd McGowan, *Capitalism and Desire*, 21

³² Joseph Stiglitz, *Globalization and its Discontents*, 4-5

³³ Donny Gahril Adian, “Karl Polanyi dan Antropologi Keadilan”, dalam *Respons (Jurnal Etika Sosial)*, vol. 15, no. 1, 2010, 39-59

³⁴ Karl Polanyi, *GT*, 130

sementara yang kedua demi meraup keuntungan atas segala hal; dan yang ketiga apa saja yang dapat dijadikan barang komoditas untuk diperjualbelikan.³⁵

Oleh karena itu, atas pengaruh cara kerja pasar modal, yang penting bukan lagi soal bagaimana hubungan manusia dan alam, melainkan soal apakah keduanya dapat dikenakan harga atau tidak.³⁶ Perlu diingat di sini, bahwa Polanyi membedakan antara masyarakat (*society*), dan manusia (*humanity*). Akan tetapi, akibat kemunculan sistem pasar (*market system*), menimbulkan apa yang disebutnya sebagai komoditas semu (*fictitious commodities*) di mana, alam (*nature*), masyarakat (*society*), dan manusia (*humanity*) diubah dan dilihat hanya sebatas sebagai objek komoditas.³⁷

Tiga Objek Komoditas

Menurut Polanyi, pasar (*market*) tidak sama dengan sistem pasar (*market system*). Pasar (*market*) memiliki peran sebagai instrumen dalam hal pengadaan dan distribusi dari tiga modus koordinasi sosial yakni resiprositas (*reciprocity*), redistribusi (*redistribution*), dan rumah tangga (*householding*).³⁸ Sedangkan sistem pasar (*market system*) terjadi karena transformasi besar (*the great transformation*) ketika pasar yang berperan sebagai instrument bagi tiga prinsip di atas, kemudian menjadi instrument koordinasi bagi dirinya sendiri. Dengan kata lain, setiap tindakan masyarakat dengan motif subsistensi diganti menjadi tindakan transaksi nilai uang dengan motif laba.³⁹ Dengan transformasi besar itu, jaring pergeseran makna tindakan ekonomi dan manusia saling tarik-menarik hingga menimbulkan sistem ekonomi pasar (*market economy*) yang dengan cepat bermuara menjadi masyarakat pasar (*market society*).⁴⁰

Ekonomi politik klasik melihat produksi barang atau jasa bergantung pada kaitan intrinsik tiga faktor yakni: tanah, modal, dan tenaga kerja (ketiganya dapat kita sebut *trias economica*).⁴¹ Bila melihat arus sejarah panjang segala kemalangan dalam proses perubahan makna di atas, kita menemukan bahwa semuanya dimulai ketika kebijakan untuk menghapus Undang-Undang Perlindungan Orang Miskin pada tahun 1834. Sehingga sejak itu, alam, masyarakat, dan manusia diubah menjadi komoditas semu (*fictitious commodities*).⁴² Dalam pandangan Polanyi, alam (*nature*), masyarakat (*society*), dan manusia (*humanity*) adalah tiga organisme alamiah yang tidak dapat dieksploitasi. Akan tetapi, agar ketiganya dapat diperjualbelikan, maka oleh pengaruh sistem pasar, makna ketiganya perlu diubah agar dapat dikendalikan. Maka alam diubah menjadi komoditas tanah, yang dapat disewa; Masyarakat diubah menjadi

³⁵ Otfried Höfee, *Critique of Freedom: The Central Problem of Modernity*, (Chicago: University of Chicago Press, 2020), 96

³⁶ Karl Polanyi, *GT*, 131

³⁷ Karl Polanyi, *GT*, 131

³⁸ Karl Polanyi, *GT*, Bab 4

³⁹ Karl Polanyi, *GT*, 43

⁴⁰ Herry-Priyono, *Memburu Manusia Ekonomi*, 470

⁴¹ Herry-Priyono, *Ekonomi Politik: Dalam Pusara Globalisasi & Neoliberalisme*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2022). 7

⁴² Karl Polanyi, *GT*, 75

sistem angka dengan sebutan ‘nasabah’ untuk dapat menghasilkan suku bunga, dan manusia diubah menjadi tenaga kerja dengan sebutan ‘buruh’ yang dapat diupah.

Bagi Polanyi, dengan mengikuti prinsip Aristoteles, melihat bahwa tanah, tenaga kerja, dan uang, bukanlah komoditas, karena komoditas adalah objek yang diproduksi untuk diperjualbelikan. Tenaga kerja yang merupakan aktivitas manusia dalam menggumuli hidupnya yang tidak diproduksi, kemudian dijadikan komoditas yang diproduksi melalui istilah “upah buruh”.⁴³ Dengan demikian tenaga manusia berubah menjadi barang yang diproduksi untuk bekerja memproduksi barang sesuai permintaan; Tanah yang merupakan istilah lain dari alam semesta yang tidak diproduksi, mengalami perubahan makna ketika dikenai istilah “sewa”, sehingga nilai sebidang tanah dilihat sesuai nilai uang yang dihasilkan; Sedangkan uang sebagai piranti daya beli yang ada melalui mekanisme perbankan, diubah menjadi komoditas ketika dikenai tugas untuk menghasilkan “bunga”. Itulah kemudian definisi uang menurut Konings, “bukanlah sebatas simbol abstrak (*abstract symbol*), atau suatu semesta kehampaan (*empty universal*), melainkan sebagai penanda ungkapan kesanggupan seseorang mengakses kebutuhan individual secara lebih intim.”⁴⁴

Akan tetapi oleh pasar, makna uang kemudian direduksi menjadi komoditas dan ketika semakin banyak dalam genggamannya, membuat pesona pemegang membengkak yang menandai individu menempatkan diri pada kelas yang berbeda sehingga dapat membedakan diri sebagai yang kaya dari yang miskin. Uang (*money*), tanah (*land*), dan tenaga kerja (*labour*), merupakan tiga unsur yang diciptakan, kemudian diproduksi untuk menjadi komoditas yang bisa diperjualbelikan.⁴⁵ Sejak saat itu, manusia pun sebagai komoditas tenaga kerja telah menjadi satu lahan pasar yang melekat pada idiom ekonomi.⁴⁶

Gerak sistem pasar kemudian menemukan dirinya dalam hasrat untuk memiliki lebih maka muncullah keinginan untuk menumpuk uang melalui tindakan yang oleh Polanyi disebut sebagai ketertanaman ekonomi (*economic embeddedness*) karena dipakai sebagai penanda performatif terhadap kegiatan yang disebut ‘ekonomi’ pada modus-modus koordinasi masyarakat yang disebut di atas.⁴⁷ Akan tetapi sejak abad ke-19 ketertanaman (*embeddedness*) ekonomi lenyap menjadi ketercerabutan (*disembeddedness*) ekonomi. Di sini, istilah tertanam digunakan untuk menunjuk kadar/gradasi keterkaitan erat antara kegiatan ekonomi dan non-ekonomi. Sedangkan ketercerabutan menunjukkan kaitan tiadanya pegangan antara yang ekonomi dan yang non-ekonomi. Dengan begitu, bagi Polanyi, ekonomi tidak tertanam dalam relasi-relasi sosial, melainkan relasi-relasi sosial tertanam dalam sistem ekonomi.⁴⁸

⁴³ Karl Polanyi, *GT*, 75

⁴⁴ Martijn Konings, *The Emotional Logic of Capitalism: What Progressives Have Missed*, (Stanford University Press, 2015), 19

⁴⁵ Yustinus Prastowo, “Gerak-Ganda: Sebuah Pemecahan Etis atas Konsep Pasar”, dalam *Respons (Jurnal Etika Sosial)*, vol. 15, no. 02, Desember 2010, 251-286

⁴⁶ Herry-Priyono, *Memburu Manusia Ekonomi*, 471

⁴⁷ Karl Polanyi, *GT*, 73

⁴⁸ Karl Polanyi, *GT*, 473

Dari sini kita kemudian melihat bahwa pencarian akan sumber daya yang menyangga kelangsungan hidup manusia ditentukan oleh mekanisme harga (upah). Dengan demikian, hidup matinya manusia dikendalikan dibawah harga pasar. Akan tetapi, proses pengupahan itu terjadi disamping prospek laba, maka proses pencarian itu pun berlangsung dibawah penentuan motif lapar (*hunger*) dan laba (*profit*). Oleh karena itu, dalam ungkapan Herry-Priyono, “Manusia dalam momen ekonomi kemudian tampil sebagai makhluk yang digerakkan oleh motif lapar dan laba. Bahkan ekonomi tidak lagi berkaitan dengan urusan kelangsungan hidup seluruh masyarakat, melainkan mengerucut pada momen tindakan individual yang digerakkan oleh lapar dan laba.”⁴⁹ Seperti sering dikatakan, kapitalisme berhasil membawa masuk visinya ke dalam ruang privat masyarakat, sehingga aktivitas masyarakat terpusat pada uang, demi memenuhi kebutuhan biologisnya.

Contoh yang sangat konkrit adalah kemiskinan di Indonesia sangat tinggi, karena hasrat manusia dikendalikan dengan berbagai rasionalisasi lapar dan laba sehingga imajinasi masyarakat diarahkan hanya oleh ilusi kenikmatan. Atau dalam ungkapan Cavanaugh: “*scarcity is implied in the daily erotics of desire*” (kelangkaan tersirat dalam erotisme keinginan sehari-hari) yang membuat keinginan manusia untuk selalu mengejar hal-hal baru. Di sini Cavanaugh hendak menegaskan bahwa karena sejumlah alasan, keinginan dalam masyarakat konsumen mengalihkan perhatian kita dari mereka yang ‘benar-benar lapar’ dan mereka yang ‘kelaparan sebagai kekurangan’ yang mengancam jiwa, bukan hanya karena daya tarik pasar lebih kuat pada benda dari pada manusia, tetapi juga karena narasi pasar menetapkan pandangan yang bersifat individualistis yang mendasar tentang manusia di mana “barang tidak dimiliki bersama, bahwa konsumsi barang pada dasarnya adalah pengalaman pribadi.”⁵⁰

Yang terjadi adalah masyarakat tidak lagi bertindak atau bekerja untuk membangun sebuah tatanan agar berkembang lebih baik dalam jangka waktu yang lama, tetapi masyarakat bekerja demi memenuhi tuntutan imajinasinya akan kenikmatan ilusif sesaat atau meminjam istilah Mannheim “fantasi-hasrat” yang timbul pertama-tama dalam diri individu dan perlahan menyatu dengan tujuan-tujuan politis suatu kelompok.⁵¹ Serupa gua Platon, imajinasi ilusif tentang uang seolah merupakan penunjuk jalan untuk keluar dari gelapnya gua, sehingga imajinasi bukan lagi menyangkut kreativitas untuk menjadi manusia utuh yang mampu melihat hidup sebagai suatu pemberian yang patut disyukuri, melainkan imajinasi justru menjadi penjara baru yang mengurung manusia.⁵²

Problem Kelangkaan Sebagai Desain

Hanya sesudah alam, masyarakat, dan manusia berhasil dijadikan komoditas, tindakan sistem pasar kemudian dapat dengan bebas menentukan apa yang harus dieksploitasi dan mana yang harus dikorbankan. Dalam kerangka berpikir demikian, kapitalisme mulai bergerak

⁴⁹ Karl Polanyi, *GT*, 490

⁵⁰ “*The idea of scarcity implies that goods are not held in common, that the consumption of goods is essentially a private experience*” [lih. Wiliam T. Cavanaugh, *Being Consumed*, 91]

⁵¹ Lih. Karl Mannheim, *Ideologi dan Utopia: Menyingkap Kaitan Pikiran dan Politik*, (trans.) F. Budi Hardiman, (Yogyakarta, Penerbit Kanisius, 1991), 224

⁵² Lih. Haryatmoko, *Dominasi Penuh Muslihat: Akar Kekerasan dan Diskriminasi*, (Jakarta: Penerbit Gramedia, 2010), 74

memainkan hasrat manusia. Ekonomi memanfaatkan kekuasaan untuk memperoleh akses terhadap sasaran eksploitasi. Kekuasaan memanfaatkan ekonomi untuk terus berada dalam lingkaran kekuasaan. Sedangkan demokrasi dijadikan jembatan penghubung antara legitimasi, legalisasi dan eksploitasi. Pada saat yang sama, ekonomi dijadikan sarana untuk memutuskan siapa yang hidup dan siapa yang mati.⁵³

Karena setiap tindakan manusia bahkan yang paling altruistik pun berasal dari hasrat untuk memperoleh sesuatu yang lain.⁵⁴ Artinya, nilai ekonomi tidak diletakkan pada nilai guna material (*material use value*), tetapi padaantisipasi kepuasan hasrat. Lacan membedakan hasrat dari kebutuhan. Hasrat berada di luar kebutuhan sekaligus melampauinya. Hasrat selalu bersifat abadi dan karena itu tidak mungkin terpuaskan sepenuhnya.⁵⁵ Apa yang relevan bagi manusia ekonomi adalah terkait dengan hasrat manusia yang menjadi sasaran nilai-tukar ekonomi, karena sesuatu hanya akan memiliki nilai-tukar apabila ketersediaannya terbatas.⁵⁶

Dari sini, kita mendapati bahwa masyarakat perlahan mulai mengalami apa yang disebut Polanyi sebagai “kelangkaan” (*scarcity*). Bahwa kelangkaan bukan karena barang kebutuhan tidak ada (barang tetap melimpah), tetapi karena ketiadaan akses bagi manusia untuk menjangkau barang yang dibutuhkan. McGowan dengan jelas menunjukkan aspek psikologisnya bagaimana kapitalisme merasuk inti subjektif masyarakat ketika berhadapan dengan problem kelangkaan. Menurut McGowan, bentuk hidup masyarakat asli – sebagai pemburu dan pengumpul – adalah masyarakat yang berkelimpahan. Tetapi ketika kapitalisme muncul, kelangkaan perlahan-lahan menjadi latar belakang transaksi. Dengan kata lain, kapitalisme tidak mensyaratkan bahwa kelangkaan itu nyata, akan tetapi kapitalisme menghendaki agar ancaman kelangkaan itu dipercaya. Dengan begitu, kapitalisme berhasil menciptakan rasa ketidakamanan subjek terhadap potensi kelangkaan yang akan segera tiba. Sehingga subjek masyarakat perlahan hidup di bawah bayang-bayang akan bahaya kekurangan pada hari esok.⁵⁷ Dari sini kemudian kelangkaan bukan hanya terjadi pada alam, melainkan juga kelangkaan dalam politik dan dalam bidang produksi kebutuhan pokok. Tiga bentuk kelangkaan berikut berangkat dari tiga objek alamiah yang direduksi menjadi komoditas di atas.

Kelangkaan Sumber Daya Alam

Dalam buku *Trade and Market in the Early Empires*, Polanyi menunjukkan bagaimana sistem pasar bertindak untuk mengambil alih ruang gerak masyarakat yang alamiah menjadi ruang gerak instrumental. Oleh karena itu, Polanyi menunjukkan dua arti ekonomi: arti formal

⁵³ Bagaimana kebijakan ekonomi kapitalis dan oligarki memutuskan siapa yang harus hidup dan siapa yang harus dikorbankan, saya telah mengulasnya ditempat lain. [Lih. Wilhelmus F. Ninu Runesi, “Nekro-Ekonomi: Menafsir Kepunahan, Mensiasati Masa Depan”, dalam *Prosiding Seminar Nasional Sanata Dharma Berbagi*, Vol 3, 2025], 501-514

⁵⁴ Lih. J. Lacan, *The Four Fundamental Concepts of Psycho-analysis*, (London: Penguin, 1979), 196-205

⁵⁵ Lih. Catatan kaki untuk bagian pertama no. 28, dalam Madan Sarup, *An Introductory Guide to Post-Strukturalism and Postmodernism*, (Georgia: The University of Georgia Press, 1993), 189

⁵⁶ Herry-Priyono, *Ekonomi Politik*, 209

⁵⁷ Todd McGowan, *Capitalism and Desire*, 197

(*formal meaning*) dan arti substantif (*substantive meaning*). Bagi Polanyi, arti formal ekonomi berangkat dari proses logika yang menyangkut keterkaitan antara sarana (*means*) dan tujuan (*ends*). Sementara arti substantif ekonomi berasal dari fakta ketergantungan pencarian manusia terhadap alam dan sesama. Dengan kata lain, arti formal itu soal logika sementara arti substantif adalah soal fakta.⁵⁸

Yang menarik adalah ketika Polanyi menyebut bahwa sistem pasar itu sesuatu yang fiktif, sehingga menciptakan suatu “postulat kelangkaan” (*scarcity postulate*). Herry-Priyono menulis: “secara faktual, sumber daya untuk hidup (air, udara, buah-buahan) telah tersedia secara melimpah. Akan tetapi, sistem pasar menginginkan kelimpahan itu harus diubah menjadi langka (*scarcity*). Caranya adalah dengan mengubah sumber daya itu menjadi komoditas sehingga kemampuan untuk mengakses sumber daya kini ditentukan oleh nilai uang. Dengan demikian, soalnya bukan lagi mengenai ketersediaan sumber daya, tetapi soal kesanggupan untuk membayar harga.”⁵⁹

Kelangkaan itu bukan karena tidak adanya barang, melainkan barangnya tetap melimpah, hanya saja tidak ada akses untuk menjangkau barang sesuai kebutuhan. Dengan kata lain, kelangkaan itu bukanlah kejadian alamiah, melainkan sesuatu yang diciptakan (*scarcity by design*).⁶⁰ Sen dan Polanyi sama-sama menegaskan bahwa kelangkaan itu adalah persoalan narasi politik bukan kenyataan alamiah. Pesona pasar bebas yang merangsek masuk di ruang privat masyarakat kita hari-hari ini menimbulkan efek yang sangat besar. Ekonomi pasar bebas atau yang dalam bahasa filsafatnya ekonomi neoliberal ini menjadikan negara-negara berkembang seperti Indonesia sebagai sasaran empuk.⁶¹

Dengan narasi pembangunan, investasi dibuka terhadap ruang-ruang hijau yang berpotensi untuk menghancurkan hutan beserta seluruh penghuninya. Indonesia sendiri melalui kebijakan pemerintah yang sangat ambisius untuk mengejar rente akhirnya mengabaikan kebutuhan serta keberlanjutan hayat hidup manusia beserta seluruh keanekaragaman hayati yang terdapat di hutan-hutan besar di Indonesia. “Rezim ekonomi neoliberal yang merupakan sebuah rancang bangun oleh negara Dunia Pertama dalam kerja sama dengan negara-negara

⁵⁸ Karl Polanyi, Conrad M. Arensberg & Harry W. Person, (ed.), *Trade and Market in the Early Empires*, 243

⁵⁹ Herry-Priyono, *Memburu Manusia Ekonomi*, 492. Untuk contoh konsep ini di Indonesia misalnya, pemerintah berupaya untuk membuat aturan yang menetapkan Cagar Alam Mutis dan Pulau Komodo menjadi Taman Nasional. Dengan begitu, setiap orang yang hendak menuju ke sana harus melewati proses berbayar. Singkatnya, masyarakat tidak lagi bebas untuk mengakses sesuatu yang alamiah itu sebab sudah dikenai harga.

⁶⁰ Amartya Sen, *Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deprivation*, (Oxford: Oxford University Press, 1981)

⁶¹ Indonesia yang kaya akan sumber daya alam, tidak didukung oleh pengetahuan yang memadai, sehingga menjadi sasaran empuk oligarki Barat. Oleh karena itu, proyek kapitalisme berhasil merangsek masuk dan mengendalikan segala sistem yang ada di negara ini. Terhadap hal ini, bdk. Noam Yuran, *What Money Wants: An Economic of Desire*, (Stanford University Press, 2014)

abstrak yang disebut sebelumnya, kemudian dipaksakan kepada negara-negara Dunia Ketiga dengan berbagai pernyataan minor yang terdengar logis.”⁶²

Kelangkaan Politis

Kelangkaan politis pertama-tama harus dibaca sebagai kelangkaan aspek hubungan antar masyarakat, yang dilihat sebatas produsen-konsumen yang disimbolkan dengan sistem uang. Masyarakat merupakan salah satu aspek yang dijadikan komoditas oleh sistem pasar. Pemaknaan ini terjadi akibat hubungan antar masyarakat diatur oleh sistem politik menjadi masyarakat pasar. “Tindakan masyarakat dinilai berdasarkan sistem pasar sehingga motif subsistensi diganti dengan motif laba.”⁶³ Sebagaimana kita melihat tindakan peningkatan suku bunga ekonomi selalu didahului dengan tindakan penghancuran hayat hidup segala makhluk yang ada di suatu wilayah, tindakan transformasi itu juga menandai suatu penghancuran hakikat masyarakat (*society*) menjadi transaksi yang didasarkan pada nilai uang. Kapitalisme terus membayangi proses kerja sama (*cooperation*) untuk menghasilkan uang. Uang menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat dalam membangun relasi dengan yang lain. Meminjam ungkapan yang dipakai oleh Noam Yuran, tidak ada ketamaman yang tidak melibatkan uang (*there is no greed without money...*).⁶⁴ Perselingkuhan antara politik (dalam hal ini kekuasaan) dan kapitalisme membawa masuk rekaan fiksi komoditas yang mengakibatkan penghancuran masyarakat sehingga tidak satu pun masyarakat yang dapat bertahan dari dampak sistem fiksi yang ganas itu, bahkan untuk waktu yang singkat.⁶⁵

Dengan sistem ekonomi terpusat seperti praksis dianut oleh negara Indonesia, sebagaimana dikritik oleh para ekonom mazhab Austrian, menunjukkan bahwa akibat “intervensi pemerintah” (baca: perselingkuhan penguasa dan pemodal) dalam kebijakan ekonomi, tidaklah rasional sebab hal itu menunjukkan seolah-olah negara memahami seluruh kebutuhan dan keinginan individu mengenai apa yang disukai dan tidak disukai. Di samping itu, narasi politik seperti “pemerataan” pembangunan mengandaikan bahwa seluruh masyarakat membutuhkan apa yang ditawarkan oleh kapitalisme lewat kebijakan pemerintah.⁶⁶ Oleh karena itu, bagi Ronald Reagan yang sangat dipengaruhi oleh Hayek, mengatakan bahwa “kebijakan pemerintah bukanlah solusi bagi permasalahan kita, pemerintah adalah masalah itu sendiri”.

Pada level ekonomi, kelangkaan diperlakukan sebagai ketidakmampuan yang tragis untuk memenuhi kebutuhan semua orang, terutama mereka yang keseharian hidupnya dihadapkan

⁶² Lih. Karin Fischer, “The Influence of Neoliberals in Chile before, during, and after Pinochet”, dalam, Philip Mirowski & Dieter Plehwe, *The Road From Mont Pelerin: The Making of the Neoliberal Thought Collective*, (Harvard: Harvard University Press, 2009), 305-346; juga, Alexander Jebadu, *Dalam Moncong Neoliberalisme*, (Mauere: Penerbit Ledalero, 2021), 136

⁶³ Herry-Priyono, *Memburu Manusia Ekonomi*, 490

⁶⁴ Noam Yuran, *What Money Want*, 14

⁶⁵ Karl Polanyi-Levitt & Marguerite Mendell, “Karl Polanyi: His Life and Times”, dalam *Studies in Political Economy*, Vol. 22, No.1 (Spring 1987), 20. Rekaan fiksi ini bisa kita lihat pada hampir seluruh kebijakan pemerintah Indonesia yang dibuat sepanjang 2019-2025

⁶⁶ Lih. Gene Callahan, *Economic for Real People: An Introduction to the Austrian School*, (Alabama: Ludwig von Mises Institute, 2004), 177-183

pada kematian akibat ketidakcukupan dan kelaparan yang ekstrim. Sedangkan pada tataran pengalaman, kelangkaan dalam budaya konsumsi dikaitkan dengan sensasi keinginan yang menyenangkan. Kelangkaan tersirat dalam erotisme keinginan sehari-hari yang membuat individu terus-menerus mengejar hal-hal baru yang ditawarkan melalui iklan.⁶⁷

Bagi Polanyi, masyarakat (*society*) merupakan organisme sosial alamiah yang di dalamnya terdapat dinamika organik pemenuhan kebutuhan material warganya. Ciri alamiah masyarakat yang direduksi jadi komoditas uang dengan mudah terjadi karena berangkat dari dilema yang dihadapi masyarakat. Bahwa disatu pihak, pasar tak mungkin bertahan tanpa meluluh-lantakkan hakikat manusiawi dan alami masyarakat, sehingga secara fisik, masyarakat membangun sistem perlindungan diri. Akan tetapi dengan membentuk perlindungan diri yang ditempuh pasti akan merusak kinerja pasar dan dengan demikian membahayakan masyarakat itu sendiri.⁶⁸

Kelangkaan Sembako

Sembako seringkali menjadi bagian yang paling sering dipolitisasi. Bila jualan agama menjadi isu yang paling krusial pada Pilkada Jakarta tahun 2017, maka sembako dalam konteks bantuan sosial memainkan peran penting dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2024. Kita melihat bansos dijadikan tunggangan untuk melanggengkan kekuasaan disamping eksploitasi konstitusi dan tindakan-tindakan nir-etis politik lain yang mengikutinya. (kelangkaan ini perlu dibaca bagaimana manusia direduksi menjadi komoditas sebatas pekerja yang dibayar untuk memenuhi kebutuhannya dalam pemikiran Polanyi).

Sembako berhubungan langsung dengan naluri bertahan hidup manusia. Tidak heran hal-hal yang berkaitan dengan dapur manusia selalu menjadi akses paling mulus bagi kelompok tertentu untuk mempertahankan kekuasaan selama mereka memiliki akses tersebut. Manusia kehilangan akal sehat ketika berhadapan dengan persoalan mata pencaharian. Dalam kerangka demikian, kita memasuki aspek kemanusiaan yang dalam pemikiran Polanyi, turut direduksi menjadi komoditas yang diperdagangkan. Itulah tenaga kerja yang bagi Polanyi merupakan nama lain bagi daya gerak manusia untuk terlibat dalam kehidupan itu sendiri.⁶⁹

Oleh karena perubahan komoditas manusia dilihat hanya berharga dengan bekerja untuk memperoleh upah, maka arti substantif ekonomi sebagai mata pencaharian, mulai terkikis oleh hempas sistem pasar yang menetapkan bagaimana mata pencaharian itu mesti diperoleh yakni dengan cara menjual tenaga kerja.⁷⁰ Akan tetapi, tidak ada yang membeli tenaga kerja bila tidak ada prospek laba. Dengan kata lain, tenaga kerja hanya dibeli bila dengan itu, manusia bisa menghasilkan pertambahan nilai. Dengan begitu, manusia hanya dapat bertahan hidup bila ada laba. Di sinilah Polanyi melihat keterkaitan antara motif lapar dan laba, dengan mengatakan bahwa “dalam momen ekonomi, manusia tampil sebagai makhluk yang digerakkan oleh motif

⁶⁷ Wiliam T. Cavanugh, *Being Consumed*, 91

⁶⁸ Karl Polanyi, *GT*, 3-4

⁶⁹ Karl Polanyi, *GT*, 75

⁷⁰ Karl Polanyi, *Primitive, Archaic, and Modern Economies*, George Dalton (ed), (New York: Anchor, 1968), 68

lapar dan laba”.⁷¹ Oleh karena itu, ekonomi neoliberal tidak melihat modal dan tenaga kerja dalam arti yang objektif melainkan subjektif. Misalnya, upah/gaji seseorang bukanlah “harga” bagi tenaga kerja yang dijual, melainkan “laba” dari “modal” yang dimiliki oleh manusia yakni otot, keterampilan, dan pengetahuan.⁷²

Maka Polanyi mengatakan bahwa fiksi tentang komoditas telah menyerahkan nasib manusia dan alam ke dalam bulan-bulanan otomaton yang bergerak menurut jalurnya sendiri, tetapi sekaligus dikendalikan oleh insentif kelaparan (*hunger*) dan keuntungan (*gain*).⁷³ Karena manusia direduksi dan hanya dapat memenuhi kebutuhan dengan menjual tenaga kerja, keterarahan pikiran adalah berdasarkan sistem pasar. Barang tersedia dengan melimpah di pusat produksi, akan tetapi dalam upaya pengendalian manusia, barang dan jasa yang melimpah perlu dibatasi dengan narasi kelangkaan. Inferioritas ekonomi membuat manusia menjadi lemah dan mudah menyerah. Paradoksnya adalah ketika terjadi kelangkaan, selalu diadakan pasar murah. Maka pasar murah bukanlah suatu solusi pemenuhan kebutuhan yang sedang langka, melainkan menunjukkan ciri masyarakat yang dibaluti kemiskinan. Kelangkaan sembako adalah kelangkaan akses manusia terhadap barang kebutuhan dasar hidup.

D. Kesimpulan

Manusia dalam pengalaman hidupnya selalu berjuang untuk dapat menghasilkan sesuatu agar dengan sesuatu itu, ia dapat memiliki akses untuk mengatasi keterbatasan biologisnya yakni rasa lapar. Di samping momen keterbatasan itu, tempat manusia berpijak bukanlah ruang hampa atau tempat kosong. Dengan kata lain, bumi tempat manusia hidup dan berkembang, merupakan rumah yang menyediakan segala sesuatu yang dapat memenuhi keterbatasan itu. Manusia diberi akal untuk dapat mengusahakan segala sesuatu yang tersedia di alam untuk dapat bertahan hidup. Itulah pesona kehidupan sebelum manusia mengenal pengetahuan modern.

Semenjak manusia mulai mengenal pengetahuan modern, alam dilihat sebagai objek yang dieksploitasi untuk memenuhi hasrat dan ketamakan manusia. Alam yang tersedia lambat laun dirusak demi sesuatu yang tidak dapat dinikmati oleh semua orang. Kapitalisme masuk dengan narasi pembangunan, meluluh-lantahkan seluruh tatanan alam. Bahkan manusia lemah pun tidak luput dari arogansi itu. Masyarakat lokal (*indigenous people*) yang mendiami dan bergantung hidup dari alam mulai mengalami ketertindasan. Masyarakat kota mengalami segala kelangkaan kebutuhan pokok akibat pelaksanaan kebijakan yang tidak adil. Di sinilah kita diingatkan kembali oleh apa yang dikatakan oleh Hobbes bahwa manusia adalah serigala bagi sesama. Yang berkuasa berkelimpahan dan yang dikuasai penuh nestapa.

Kondisi kelangkaan itu diisyaratkan hanya pada sesuatu yang dapat dikenai harga. Maka seketika segala jenis barang dan jasa, bahkan alam (hutan, pohon, air), menjadi langka karena sudah dikenai harga. Manusia minor tidak lagi bebas mengakses kebutuhan yang bahkan

⁷¹ Karl Polanyi, *Primitive, Archaic, and Modern Economies*, 69. Contoh paling jelas adalah bidang Koperasi. Di mana supaya laba atau sahamnya meningkat dan upah juga meningkat, maka pegawai koperasi dituntut untuk memperoleh anggota baru.

⁷² Herry-Priyono, *Ekonomi Politik*, 7

⁷³ Karl Polanyi, *The Livelihood of Man*, 10-11

alamiah sekalipun karena semua bergantung pada daya beli (*purchasing power*), tanpa kepedulian apakah barang itu memang langka atau melimpah. Hanya dengan itu, 'ekonomi' menjadi urusan maksimalisasi penggunaan sarana yang langka bagi tujuan akumulasi laba.⁷⁴ Dengan memahami problem kelangkaan sebagai desain ini, kita menyadari bahwa manusia pada alam bawah sadarnya tidak pernah mengalami kepuasan. Dan kondisi kelangkaan akan terus bergerak beriringan dengan hembusan napas kekuasaan.

Polanyi masuk ke dalam jantung sejarah ekonomi bukan untuk menawarkan kajian teknis, ia masuk ke dalam logika internal ilmu ekonomi untuk menunjukkan bahwa tak ada yang benar-benar alamiah dalam setiap klaim kebijakan ekonomi pasar. Itulah kegelisahan moral yang dialami Polanyi ketika bertanya: Bagaimana realitas manusia tetaplah merupakan relasi-relasi dan bukan transaksi-transaksi komoditas.

Daftar Pustaka

- Badan KPA. *Dekade Krisis Agraria: Warisan Nawacita dan Masa Depan Reforma Agraria Pasca Perubahan Politik 2024*, (Desember 2023)
- Badan KPA. *Adakah Reforma Agraria di Bawah Komando Prabowo?: Catatan Akhir Tahun 2024*, (Desember 2024)
- Callahan, Gene. *Economic for Real People: An Introduction to the Austrian School*, Alabama: Ludwig von Mises Institute, 2004
- Cavanugh, William T. *Being Consumed: Economics and Christian Desire*, USA: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 2008
- Chester Jordan, William. *The Great Famine: Northern Europa in the Early Fourteenth Century*, Princeton: Princeton University Press, 1996
- Gahral Adian, Donny. "Karl Polanyi dan Antropologi Keadilan", dalam *Respons (Jurnal Etika Sosial)*, vol. 15, no. 1, 2010, p. 39-59
- Guriev, Sergei and Treisman, Daniel. *Spin Dictators: The Changing Face of Tyranny in the 21st Century*, Princeton University Press, 2022
- Haryatmoko. *Dominasi Penuh Muslihat: Akar Kekerasan dan Diskriminasi*, Jakarta: Gramedia, 2010
- Harvey, David. *The Enigma of Capital and the Crises of Capitalism*, Oxford: Oxford University Press, 2010
- Harvey, David. *A Brief History of Neoliberalism*, (New York: Oxford University Press, 2005)
- Herry-Priyono, B. *Memburu Manusia Ekonomi, Menggeledah Naluri*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2022
- _____. *Ekonomi Politik: Dalam Pusara Globalisasi & Neoliberalisme*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2022
- Höfee, Otfried. *Critique of Freedom: The Central Problem of Modernity*, Chicago: University of Chicago, 2020
- Jebadu, Alexander. *Dalam Moncong Neoliberalisme*, Maumere: Penerbit Ledalero, 2021
- Konings, Martijn. *The Emotional Logic of Capitalism: What Progressivnes Have Missed*, Stanford University Press, 2015
- Lacan, Jacques. *The Four Fundamental Concepts of Psycho-analysis*, London: Penguin, 1979
- Mannheim, Karl. *Ideologi dan Utopia: Menyingkap Kaitan Pikiran dan Politik*, (trans.) F. Budi Hardiman, (Yogyakarta, Penerbit Kanisius, 1991)
- McGowan, Todd. *Capitalism and Desire: The Psychic Cost of Free Markets*, New York: Columbia University Press, 2016

⁷⁴ Karl Polanyi, *The Livelihood of Man*, 11

- Mirowski, Philip & Plehwe, Dieter. *The Road From Mont Pelerin: The Making of the Neoliberal Thought Collective*, (Harvard: Harvard University Press, 2009)
- Polanyi, Karl. *The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time* (1st edition) Boston: Beacon Press, 1944 [1957]
- _____. *The Livelihood of Man: Studies in Social Discontinuity*, (ed.) Harry W. Pearson, New York: Academic Press, 1977
- _____. *Primitive, Archaic, and Modern Economies*, George Dalton (ed), New York: Anchor, 1968
- Polanyi, Karl. M. Arensberg, Conrad. & W. Person, Harry (ed.). *Trade and Market in the Early Empires: Economic in History and Theory*, (USA: The Free Press, 1957)
- Polanyi-Levitt, Karl & Mendell, Marguerite. "Karl Polanyi: His Life and Times", dalam *Studies in Political Economy*, Vol. 22, No.1 (Spring 1987)
- Prastowo, Yustinus. "Gerak-Ganda: Sebuah Pemecahan Etis atas Konsep Pasar", dalam *Respons (Jurnal Etika Sosial)*, vol. 15, no. 02, Desember 2010, 251-286
- Runesi, Wilhelmus F. Ninu. "Nekro-Ekonomi: Menafsir Kepunahan, Mensiasati Masa Depan", dalam *Prosiding Seminar Nasional Sanata Dharma Berbagi*, Vol 3, 2025, <https://e-conf.usd.ac.id/index.php/usdb>, 501-514
- Sarup, Madan. *An Introductory Guide to Post-Strukturalism and Postmodernism*, (Georgia: The University of Georgia Press, 1993)
- Sen, Amartya. *Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deprivation*, Oxford: Oxford University Press, 1981
- Stiglitz, Joseph. Sen, Amartya & Fituossi, Jean-Paul. *Mengukur Kesejahteraan: Mengapa Produk Domestik Bruto Bukan Tolok Ukur yang Tepat untuk Menilai Kemajuan?*, Jakarta: Penerbit Marjin Kiri, 2011
- Stiglitz, Joseph. *Globalization and its Discontents*, London: W.W Norton & Company, 2002
- Stiglitz, Joseph. *The Roaring Ninties: Why We're Paying the Price for the Greediest Decade in History*, (London: Penguin Books, 2003)
- Supelli, Karlina. "Sains sebagai Keselamatan dalam Pandangan Francis Bacon", dalam *Diskursus: Jurnal Filsafat dan Teologi*, Vol. 14, No. 1, April 2015, 101-140
- Taryadi, Alfons. *Epistemologi Pemecahan Masalah Menurut Karl R. Popper*, Jakarta: Penerbit Gramedia, 1989
- Yuran, Noam. *What Money Wants: An Economic of Desire*, Stanford University Press, 2014
- A.